Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28158-28164

Klinik Apung sebagai Upaya Ditpolairud Polda Jawa Timur untuk Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat Pesisir

Tri Anggarani Wulandari[1], Ismail[2], Tri Prasetijowati[3]
Universitas Bhayangkara Surabaya

Corresponding Author: Tri Anggarani Wulandari, e-mail: trianggaraniwulandari@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat pesisir melalui program inovatif klinik apung. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat pesisir terhadap pelayanan kesehatan dan kehadiran aparat keamanan di wilayah yang sulit dijangkau. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali pelaksanaan program berdasarkan pendekatan manajemen POAC *(Planning, Organizing, Actuating, Controlling)* dan menganalisis dampaknya terhadap persepsi rasa aman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klinik apung tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara melalui kepolisian, yang berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan masyarakat pesisir. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana prasarana, Ditpolairud Polda Jatim tetap mampu menjalankan program ini dengan pendekatan humanis dan kolaboratif. Masyarakat merasa diperhatikan dan terlindungi, yang memperkuat dimensi psikologis rasa aman mereka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan anggaran, peningkatan kualitas SDM, dan integrasi lintas sektor agar klinik apung dapat terus berlanjut dan menjadi model pelayanan publik di daerah terpencil. Temuan ini menegaskan bahwa keamanan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Keywords: Ditpolairud, klinik apung, masyarakat pesisir, rasa aman

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara. Ditpolairud bukan hanya sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran maritim seperti penyelundupan dan perompakan, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat pesisir melalui pendekatan humanis. Pendekatan ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara kepolisian dan warga pesisir, sehingga kolaborasi dalam menciptakan kondisi aman dapat terjalin secara efektif (Pancarudin, 2019).

Wilayah pesisir Jawa Timur memegang peran vital dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, namun juga menghadapi tantangan besar seperti kriminalitas laut, akses kesehatan yang terbatas, dan kerentanan terhadap bencana. Dalam menghadapi kondisi ini, Ditpolairud Polda Jatim meluncurkan program Klinik Apung yang berfokus pada pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat pesisir. Program ini menjadi inovasi strategis untuk meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan publik melalui kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar (Hikmah, M., 2023).

Klinik Apung memberikan layanan medis seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada warga pesisir dan nelayan yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Selain aspek medis, program ini juga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri karena memperlihatkan bahwa aparat kepolisian bukan hanya bertindak represif, tetapi juga solutif dan peduli terhadap kesejahteraan warga (Prabowo, 2023).

Namun, pelaksanaan program ini dihadapkan pada tantangan mendasar, terutama keterbatasan anggaran. Dana yang terbatas memengaruhi kualitas peralatan medis, pemeliharaan kapal,

hingga operasional harian. Padahal, keberlangsungan program sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai untuk menjangkau wilayah-wilayah pesisir secara berkelanjutan (Ariadno, 2009).

Selain anggaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala besar. Klinik Apung membutuhkan tenaga medis profesional seperti dokter dan perawat serta personel kepolisian yang memahami wilayah laut. Namun, sulitnya distribusi tenaga profesional ke daerah terpencil seringkali membuat layanan tidak optimal. Ini menunjukkan perlunya strategi rekrutmen dan pelatihan SDM yang berbasis kawasan pesisir.

Fasilitas pendukung seperti peralatan komunikasi, logistik, dan koordinasi darurat juga belum sepenuhnya memadai. Kurangnya fasilitas ini berpotensi menghambat respon cepat dalam keadaan darurat atau ketika terjadi insiden kriminal di wilayah laut. Ditpolairud perlu meningkatkan infrastruktur dan integrasi dengan lembaga lain agar efektivitas Klinik Apung dapat maksimal dan berkelanjutan. Program Klinik Apung merupakan langkah nyata Ditpolairud Polda Jatim dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pesisir akan rasa aman dan layanan kesehatan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, program ini tetap relevan dan memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Penelitian terhadap program ini penting untuk mengukur efektivitasnya dan bagaimana ia dapat diintegrasikan lebih luas dalam strategi keamanan berbasis komunitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "upaya" berarti usaha, ikhtiar, atau daya upaya untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, atau mencari jalan keluar. Dengan kata lain, upaya adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau memperbaiki keadaan yang ada (Ramadan & Mulysti, 2020). Upaya adalah bentuk nyata dari niat dan usaha kita untuk memperbaiki keadaan, melangkah ke arah yang lebih baik, atau bertahan dalam situasi sulit. Dalam konteks yang lebih luas, upaya mencerminkan semangat manusia untuk tidak menyerah, untuk terus mencari jalan ketika satu jalan tertutup, dan untuk terus bergerak meskipun perlahan. Selain itu, upaya juga bisa berarti bentuk tanggung jawab, terutama ketika dilakukan dalam kapasitas tertentu seperti seorang guru yang berupaya membimbing muridnya, atau seorang polisi yang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Pangaribuan et al., 2025). Dalam hal ini, upaya adalah bagian dari tugas moral dan profesional yang dijalani dengan kesungguhan.

Ditpolairud Polda Jawa Timur (Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara) adalah salah satu unit operasional di bawah Kepolisian Daerah Jawa Timur yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Ditpolairud Polda Jatim dibentuk sebagai respons atas kebutuhan untuk menjaga keamanan di wilayah perairan yang luas, terutama dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Sejak didirikan, Ditpolairud berperan penting dalam penegakan hukum, pengawasan, serta kegiatan penyelamatan di wilayah laut. Maslow menggambarkan rasa aman sebagai perasaan terlindungi, baik dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Rasa aman ini bukan hanya soal bebas dari bahaya fisik, tapi juga tentang merasa tenang secara batin (Febrieta & Pertiwi, 2018).

Ketika seseorang merasa aman, mereka memperoleh ketenangan, kepastian, dan keteraturan dalam hidupnya. Ini membuat lingkungan sekitar terasa stabil dan dapat dipercaya, sehingga mereka tidak mudah merasa cemas atau takut. Rasa aman ini sangat penting karena menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa fokus pada hal-hal lain dalam hidup, seperti berkembang dan mencapai tujuan (Himawan & Himawan, 2023).

Lebih dari sekadar perlindungan fisik, rasa aman juga mencakup perlindungan psikologis (Fitriatun et al., 2023). Artinya, seseorang perlu merasa bahwa dirinya terlindungi dari tekanan mental, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang bisa mengganggu kesejahteraan jiwa. Misalnya, merasa punya jaminan pekerjaan, hubungan yang stabil, atau lingkungan yang mendukung.

Maslow juga menekankan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi kebutuhan untuk dijauhkan dari segala bentuk bahaya, baik yang nyata seperti ancaman fisik, maupun yang bersifat psikologis seperti stres dan ketakutan yang berlebihan. Dengan kata lain, rasa aman adalah fondasi penting yang membuat seseorang merasa hidupnya terjamin dan nyaman (Mustofa, 2022). Semoga penjelasan ini membantu memberikan gambaran yang lebih hangat dan mudah dimengerti tentang

pentingnya rasa aman dalam kehidupan manusia! Jika ingin, saya juga bisa membantu menjelaskan kebutuhan lain dalam hierarki Maslow

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan program Klinik Apung oleh Ditpolairud Polda Jatim menciptakan rasa aman di masyarakat pesisir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyelami langsung pengalaman para pelaku lapangan dan masyarakat, guna menangkap makna dan proses yang berlangsung secara alamiah dalam konteks sosial tertentu (Nasution, 2023). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di *Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur* sebagai pelaksana program, serta di wilayah pesisir *Kabupaten Gresik* sebagai komunitas sasaran. Lokasi ini dipilih karena relevan untuk mengkaji implementasi dan dampak program Klinik Apung terhadap masyarakat nelayan dan komunitas maritim. Subjek penelitian terdiri dari petugas Ditpolairud (Kasubdit, Komandan kapal, petugas medis), serta masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian berfokus pada informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam kegiatan Klinik Apung.

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: (1) *Perencanaan kegiatan Klinik Apung*, termasuk penentuan tujuan dan strategi; (2) *Penggunaan anggaran*, mengingat program ini tidak berada dalam mata anggaran rutin Polri; dan (3) *Pengendalian pimpinan Ditpolairud*, yang mencakup sistem evaluasi dan monitoring keberhasilan program di lapangan. Sumber data terdiri dari *data primer* (hasil wawancara langsung dengan petugas Ditpolairud dan masyarakat pesisir) serta *data sekunder* (dokumen resmi Ditpolairud, literatur akademik, dan laporan terdahulu terkait program dan peran kepolisian dalam pelayanan publik).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada petugas klinik dan masyarakat menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung data primer dan memberikan informasi tambahan melalui dokumen, foto, dan laporan kegiatan (Madangsari, 2023).Teknik analisis data dilakukan secara *induktif*, dengan tiga tahapan utama: (1) *Reduksi data*, yaitu menyaring data yang relevan; (2) *Penyajian data* dalam bentuk naratif atau tematik; dan (3) *Penarikan kesimpulan* berdasarkan pola dan makna yang muncul dari data lapangan. Proses ini mengikuti model analisis dari (Nasution, 2023), yang menekankan pemahaman terhadap makna sosial dan kontribusi nyata dari program yang diteliti. Terakhir, langkah-langkah penelitian terdiri atas identifikasi masalah, studi literatur, penentuan lokasi dan informan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil. Rangkaian ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin keabsahan dan keterandalan hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Klinik Apung oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur dalam Rangka Menciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat Pantai

Program Klinik Apung yang digagas oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur merupakan inovasi pelayanan publik di wilayah perairan yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat pesisir yang minim akses terhadap fasilitas kesehatan. Pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin dengan menyasar desa-desa nelayan terpencil yang sulit dijangkau kendaraan darat. Kapal patroli milik Ditpolairud dimodifikasi menjadi klinik bergerak, dilengkapi tenaga medis dan peralatan dasar pelayanan kesehatan (Madangsari, 2023).

Pelayanan yang diberikan tidak terbatas pada pengobatan ringan, tetapi juga meliputi penyuluhan kesehatan, pemberian vitamin, vaksinasi, serta pendataan status kesehatan warga. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dalam arti luas, yaitu tidak hanya dari gangguan keamanan, tetapi juga dari ancaman kesehatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat pesisir (Nasution, 2023).

Kegiatan Klinik Apung ini dijalankan dalam koordinasi antara Ditpolairud dan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Kolaborasi ini penting karena Ditpolairud

bukanlah institusi kesehatan, sehingga dukungan profesional medis menjadi esensial. Penempatan kegiatan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan kerentanan wilayah pesisir tertentu, terutama yang jauh dari pusat layanan kesehatan formal.

Setiap misi Klinik Apung disertai dengan kegiatan humanis lainnya, seperti pembagian bantuan sosial dan edukasi tentang keselamatan di laut. Pelayanan bersifat responsif terhadap kondisi setempat, misalnya saat musim pancaroba, Ditpolairud juga memberikan penyuluhan terkait penyakit yang rawan muncul akibat cuaca ekstrem. Mekanisme evaluasi dilakukan secara berkala melalui laporan kegiatan dan umpan balik dari masyarakat. Ditpolairud mencatat jumlah warga yang dilayani, jenis penyakit yang paling sering ditemui, serta tanggapan masyarakat terhadap pelayanan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan. Evaluasi dilaksanakan per triwulan dengan pembandingan terhadap baseline awal program agar perubahan dapat diukur secara objektif. Data dihimpun melalui survei kepuasan berbasis skala Likert, FGD *(focus group discussion)* dengan tokoh lokal, serta audit logbook layanan. Indikator kinerja yang dipantau meliputi waktu tunggu, tingkat rujukan ke fasilitas kesehatan darat, dan persentase kunjungan ulang, sehingga rekomendasi perbaikan bersifat terukur.

Pelaksanaan Klinik Apung juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi positif antara aparat kepolisian dan masyarakat pesisir. Selama ini, wilayah pesisir sering kali merasa terpinggirkan atau curiga terhadap kehadiran aparat. Dengan adanya interaksi dalam konteks kemanusiaan, tumbuhlah kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Petugas menerapkan prinsip community policing melalui dialog terbuka, edukasi kesehatan, dan kunjungan rumah bagi kelompok rentan. Komunikasi dua arah ini mengurangi jarak sosial serta meminimalkan miskomunikasi yang berpotensi memicu resistensi. Tingkat kehadiran warga dalam penyuluhan dan jumlah relawan lokal yang terlibat dijadikan indikator kuantitatif peningkatan kepercayaan publik. Selain pelayanan medis, keberadaan Klinik Apung sering kali menjadi ruang mediasi terhadap potensi konflik lokal, misalnya sengketa antar-nelayan atau penertiban alat tangkap ilegal. Dengan pendekatan yang persuasif dan kehadiran rutin di wilayah tersebut, Ditpolairud turut menjaga stabilitas keamanan secara preventif. Proses mediasi diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan, kesepakatan aturan main, dan pencatatan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika diperlukan, pendekatan keadilan restoratif difasilitasi untuk mencapai kesepahaman tanpa memperuncing sanksi pidana, dengan tetap mengedepankan kepatuhan hukum. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan dipantau tindak lanjutnya melalui kunjungan berkala bersama perangkat desa serta dinas terkait.

Dengan pendekatan multidimensi tersebut, pelaksanaan Klinik Apung tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah maritim. Hal ini sejalan dengan upaya membangun *keamanan manusia* (human security), di mana rasa aman tidak hanya diukur dari tidak adanya kejahatan, tetapi juga dari terpenuhinya hak dasar atas kesehatan dan pelayanan publik.

Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur dalam Menjalankan Program Klinik Apung

Pelaksanaan program Klinik Apung oleh Ditpolairud Polda Jatim dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, yang pertama adalah komitmen pimpinan institusi**.** Tanpa dukungan dari pimpinan Ditpolairud dan Polda Jatim, program ini tidak mungkin berjalan secara konsisten karena tidak termasuk dalam anggaran rutin Polri[1]. Inisiatif dan keberanian dalam berinovasi menjadi kekuatan internal utama.

Kedua, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi faktor penting. Personel Ditpolairud harus memiliki kemampuan multidisipliner, tidak hanya di bidang keamanan, tetapi juga memahami logistik pelayanan publik. Begitu pula kapal patroli harus dimodifikasi agar dapat berfungsi sebagai klinik terapung. Ketiga, faktor manajemen internal dan sistem evaluasi**.** Program ini berjalan berkat sistem koordinasi internal yang baik, termasuk jadwal keberangkatan

[1] Laporan Internal Polairud, 2024

kapal, pembagian tugas tim, dan pelaporan hasil kegiatan secara administratif maupun naratif. Tanpa manajemen internal yang rapi, pelaksanaan bisa tidak konsisten.

Dari sisi eksternal, faktor utama adalah dukungan masyarakat pesisir. Antusiasme dan keterbukaan warga terhadap program ini menjadi penentu keberhasilan. Jika masyarakat tidak menerima kehadiran klinik apung karena alasan budaya, ketidakpercayaan, atau trauma terhadap institusi negara, maka program tidak akan mencapai tujuannya.Faktor eksternal lainnya adalah dukungan dari instansi lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini memberikan legitimasi, sumber daya tambahan, serta memperkuat sinergi antar-lembaga. Tanpa kerja sama ini, Ditpolairud tidak dapat menyediakan tenaga medis secara berkelanjutan.

Selain itu, kondisi geografis dan cuaca menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan akses geografis yang sulit sering kali menghambat jadwal pelayaran dan pelayanan. Ditpolairud harus adaptif terhadap dinamika ini demi keselamatan tim dan efektivitas pelayanan. Faktor kebijakan pusat dan dukungan regulasi juga turut memengaruhi. Selama ini, program Klinik Apung belum masuk dalam *blueprint* atau kebijakan nasional Polri secara menyeluruh, sehingga keterbatasan anggaran menjadi tantangan. Jika program ini mendapat pengakuan resmi dari pusat, tentu keberlanjutannya akan lebih terjamin. Akhirnya, perubahan sosial dan dinamika ekonomi pesisir turut menentukan. Masyarakat pesisir yang makin terbuka terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatnya kebutuhan akan akses kesehatan dasar, menjadikan program ini semakin relevan. Hal ini menjadi dorongan eksternal yang memperkuat semangat pelaksana.

Upaya yang Dilakukan Ditpolairud Polda Jatim dalam Rangka Menciptakan Rasa Aman Masyarakat Pantai melalui Program Klinik Apung

Salah satu upaya strategis Ditpolairud Polda Jatim adalah menyediakan pelayanan kesehatan secara langsung di wilayah pesisir terpencil. Pendekatan ini menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terjangkau fasilitas kesehatan, dan sekaligus menunjukkan kehadiran negara melalui aparat kepolisian dalam bentuk pelayanan humanis.Ditpolairud juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari program Klinik Apung. Penyuluhan ini meliputi pencegahan penyakit menular, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan edukasi tentang kesehatan anak dan ibu hamil. Upaya ini menciptakan rasa aman dalam arti masyarakat memahami risiko dan tahu bagaimana mencegahnya.

Pelibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dari strategi. Warga diajak terlibat sejak perencanaan hingga pelaksanaan, seperti menentukan titik labuh kapal, membantu logistik, atau menyebarluaskan informasi ke tetangga. Pelibatan ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan memperkuat relasi sosial. Di sisi kelembagaan, Ditpolairud menjalin kerja sama lintas sektor, baik dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat sumber daya program, tetapi juga membuka kemungkinan replikasi di daerah lain. Bentuk sinergi ini menunjukkan kesadaran Ditpolairud akan pentingnya pendekatan interdisipliner.

Upaya lain yang signifikan adalah pendekatan komunikasi persuasif. Petugas Ditpolairud dilatih untuk tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga membangun komunikasi positif dan mendengarkan keluhan warga. Hal ini menciptakan citra kepolisian yang lebih ramah dan proaktif, sehingga memperkuat rasa aman secara psikologis.

Program Evaluasi Klinik Apung juga berfungsi sebagai platform deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan sosial (Darmareja et al., 2024). Selama pelayanan, petugas dapat mengidentifikasi kerentanan masyarakat, seperti konflik nelayan, praktik ilegal di laut, atau perdagangan manusia. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan preventif. Sebagai bentuk konsistensi, Ditpolairud melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan Klinik Apung. Penilaian ini mencakup jumlah pasien, efektivitas pelayanan, tantangan lapangan, dan kepuasan warga. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan memastikan program berjalan berkelanjutan.

Akhirnya, keberadaan Klinik Apung menegaskan bahwa Ditpolairud tidak hanya bertugas menjaga keamanan laut, tetapi juga menjadi agen pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan aspek

kesehatan, keamanan, dan sosial, Ditpolairud menciptakan rasa aman secara holistik bagi masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program Klinik Apung yang dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur terbukti menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat pesisir akan akses layanan kesehatan dan rasa aman. Program ini bukan hanya bentuk pelayanan medis, tetapi juga simbol kehadiran negara yang humanis, mengedepankan pendekatan solutif dan preventif di wilayah-wilayah sulit dijangkau. Pelaksanaan program dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, pengorganisasian tim lintas profesi (kepolisian dan medis), hingga pelaksanaan pelayanan yang ramah serta pengawasan ketat demi menjaga kualitas. Klinik Apung menciptakan kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat yang mendorong terbentuknya rasa aman secara sosial dan psikologis.

Faktor internal seperti keterbatasan anggaran dan sarana tidak menghalangi komitmen Ditpolairud dalam menjalankan program ini, berkat semangat pengabdian dan dukungan institusional. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi geografis yang menantang, antusiasme masyarakat, serta dukungan stakeholder turut menjadi penentu keberhasilan program. Secara keseluruhan, Klinik Apung menjadi contoh nyata keberhasilan pendekatan kepolisian yang humanis dan partisipatif. Program ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Klinik Apung layak dikembangkan lebih luas sebagai model transformasi pelayanan publik berbasis keamanan di wilayah pesisir Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan empat langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program Klinik Apung oleh Ditpolairud Polda Jawa Timur. Pertama, perlunya peningkatan anggaran dan dukungan logistik melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Kedua, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan penambahan tenaga medis profesional. Ketiga, perluasan jangkauan serta penambahan frekuensi layanan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Keempat, pentingnya mendorong kolaborasi lintas sektor dengan berbagai instansi dan organisasi untuk memperkuat sinergi pelayanan keamanan dan kesehatan secara berkelanjutan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini, terutama kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur atas inisiasi, komitmen, dan dukungan data terkait program inovatif Klinik Apung; Universitas Bhayangkara Surabaya atas dukungan institusional; dan yang paling utama adalah Masyarakat Pesisir Kabupaten Gresik serta seluruh komunitas maritim yang telah berpartisipasi aktif dan terbuka dalam memberikan informasi, yang mana antusiasme mereka menjadi bukti nyata keberhasilan program ini.

REFERENSI

Ariadno, M. (2009). *Hukum Laut Internasional dan Implementasi Nasional*. Raja Grafindo Persada.

Darmareja, R., Utami, G. T., Anggraeni, D. T., Zahra, N. T., Isnainyah, M., & Mawaddah, F. (2024). Penguatan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Hipertensi Emergensi sebagai Upaya Pencegahan Kondisi Kegawatdaruratan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, *7*(2), 823–836. https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i2.13105

Febrieta, D., & Pertiwi, Y. W. (2018). Rasa aman sebagai prediktor kepercayaan masyarakat dengan hadirnya polisi. *Jurnal Mediaps*, *4*(2), 68–75.

Fitriatun, E., Febriyanti, B., Ariany, F., Sukarman, S., Irmasyah, J., & Subki, S. (2023). Program Kemitraan Masyarakat: Layanan Psikologi dalam Mendukung Perkembangan dan Penanganan Pertama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Bimbel Buah Hati. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *8*(2), 276–283. https://doi.org/10.36312/linov.v8i2.1246

Hikmah, M., et al. (2023). Sinergi Polisi dan Masyarakat dalam Penanggulangan Kriminalitas. *Jurnal Ilmu Sosial*, *7*(2), 115–123.

Himawan, A.-, & Himawan, A.-. (2023). A Optimalisasi Pemolisian Masyarakat guna Memberikan Rasa Aman dan Rasa nyaman pada Masyarakat, Sudut Pandang Ilmu Psikologi.: Optimalisasi Pemolisian Masyarakat guna Memberikan Rasa Aman dan Rasa nyaman pada Masyarakat, Sudut Pandang Ilmu Psikologi. *Jurnal Litbang Polri*, *26*(1), 30–40. https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i1.197

Madangsari, R. (2023). *Model Pelayanan Klinik Apung Ditpolairud*. STIK-PTIK Press.

Mustofa, A. Z. (2022). Hierarchy of Human Needs: A Humanistic Psychology Approach of Abraham Maslow. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, *3*(2), 30–35. https://doi.org/10.30984/kijms.v3i2.282

Nasution, D. (2023). *Penegakan Keamanan Berbasis Human Security*. Rajawali Pers.

Pancarudin. (2019). *Penegakan Hukum dan Keamanan oleh Polri*. Prenada Media.

Pangaribuan, T., Harianja, S. I., Nurjannah, I., Rahayani, F., & Nurhaliza, A. (2025). Membangun Integritas dalam Profesi Pendidik: Etika, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *25*(1), 583. https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5308

Prabowo, A. (2023). *Strategi Humanis Kepolisian dalam Wilayah Maritim*. Unair Press.

Ramadan, S., & Mulysti, Y. (2020). Makna Kata dalam Bahasa Indonesia (Salah Kaprah dan Upaya Perbaikannya). *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, *9*, 90. https://doi.org/10.26499/rnh.v9i1.1036